



**DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN**

RENJA

RENCANA KERJA
SKPD

TAHUN ANGGARAN

2025





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 100.3.3/030/DTKP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
LINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terkait oleh ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Januari 2024

**an. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S,STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/030/DTKP/2024
Tanggal : 17 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK	Anggota
10.	Subkor Hubungan Industrial	Anggota
11.	Subkor Persyaratan Kerja	Anggota
12.	Subkor Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
13.	Subkor Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Subkor Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Subkor Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
17.	Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
18.	Subkor Pemberdayaan Industri	Anggota

an. BUPATI TANAH LAUT

KEPALA DINAS,



MASTURI, S,STP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	57
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	60
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
2.5. Usulan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Non APBD	67
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	70
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	70
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disnakerind.....	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	83
4.1. Program dan Kegiatan	83
BAB V PENUTUP	92

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan pada program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, juga memperhatikan ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebelumnya penyusunan Renja SKPD ini juga mengacu pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang dapat kami persembahkan, dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi masyarakat Tanah Laut khususnya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Pelaihari, 5 Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, SSTP
NIP. 19770705 199612 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk kegiatan selama satu tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD tahun 2024 - 2026.

Renja SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan penyusunan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta dalam upaya lebih meningkatkan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan SKPD terkait demi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Renja dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2024-2026 ke dalam program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
3. Memudahkan dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan
 - c. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting
- 5.2 Kaidah- kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut



disnakerind
K O M P E T I T I F

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 telah berjalan dan terlaksana dengan cukup baik. Dari program dan kegiatan yang telah disusun, realisasi fisik mampu terealisasi sebesar 99,56% sedangkan realisasi keuangan pada tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 87,30%, dimana dari Pagu Anggaran yang diberikan sebesar Rp. 13.022.040.677,- (tiga belas milyar dua puluh dua juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dapat teralisasi sebesar Rp. 11.368.038.491,- (sebelas milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), hal ini dapat diartikan bahwa baik fisik dan keuangan mampu terserap dengan baik, dimana semua kegiatan sudah dapat dilaksanakan begitu juga realisasi keuangannya mampu terserap seiring dengan terlaksananya kegiatan – kegiatan dilapangan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tersebut beberapa kendala sering menghambat akan tetapi tidak mengganggu pencapaian program dan kegiatan secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan.

Capaian Sasaran Renstra SKPD organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan

dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Capaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 sebagai berikut :

a. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah berupa dukungan anggaran dan konsistensi politik untuk mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah melalui peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian atau kompetensi tenaga kerja, pemagangan berbasis kompetensi serta penciptaan wirausaha baru.

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Dalam memformulasikan TPAK, yang dihitung adalah jumlah Angkatan Kerja dibagi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas dikalikan 100%. Penghitungan TPAK ini berguna untuk mengindikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia.

$$. TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 terealisasi sebesar 69,61% dari yang ditargetkan sebesar 71,9% atau mengalami penurunan sebesar 1,31% dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar 70,92%. Sedangkan kalau dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Selatan yang terealisasi sebesar 69,76% sedikit lebih rendah yaitu sebesar 0,15%.

Berdasarkan data BPS kabupaten Tanah Laut TPAK dan TPT Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK dan TPT Kab. Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635
PENGANGGURAN (Orang)	5.827	6.490	6.506	7.675	6.632
TPAK (%)	69,19	72,03	72,27	70,92	69,61
TPT (%)	3,38	3,57	3,52	4,17	3,58
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	248.819	252.428	256.054	259.629	266.148
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42

Sumber BPS Tanah Laut

Tabel 3.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Prov. Kalsel Tahun 2021 s/d Tahun 2023

Kabupaten	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
	2021		2022		2023	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
KALIMANTAN SELATAN	69,08	69,26	69,64	67,55	69,53	69,76
TANAH LAUT	-	72,27	-	70,92	-	69,61

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam memaknai persentase TPAK yang tinggi perlu memperhatikan variabel berikut :

1. **Pendidikan.**

Implementasi dari program pendidikan dasar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. **Usia.**

Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

3. **Jenis kelamin.**

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung **Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja** maka didukung juga dengan indikator **“Persentase Peserta Latih Yang Kompeten”** yang ada pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Peserta latih yang kompeten ini dapat dilihat dari pencari kerja yang terlatih yang mengikuti UJK/Uji Kompetensi sesuai dengan kejuruan yang dipilih oleh peserta latih tersebut. Diharapkan dengan banyaknya pencari kerja yang kompeten maka dapat bersaing dengan pencari kerja dari luar Kabupaten Tanah Laut sehingga akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

Adapun cara menghitung persentase peserta latih yang kompeten dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$PK = \frac{\Sigma a}{\Sigma b} \times 100\%$$

Keterangan:

PK : Peserta yang Kompeten

a : Jumlah Peserta Latih yang Lulus Uji Kompetensi

b : Jumlah Latih Seluruh Paket Kejuruan

Pada tahun 2023 realisasi capaian persentase peserta latih yang kompeten adalah sebesar 47,68% atau dengan capaian 63,57%, kalau dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 32,90%, tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,78%. Hal ini bisa dikatakan bahwa banyaknya yang berminat mengikuti pelatihan/pemagangan baik yang diselenggarakan oleh dinas maupun yang diselenggarakan oleh BLK, selain mengikuti pelatihan/pemagangan yang diselenggarakan oleh dinas dan BLK, mereka juga banyak yang mengikuti pelatihan di LPK-LPK swasta yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan mengikuti pelatihan di BLK Komunitas yang ada.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi pencari kerja dari 12 paket pelatihan yang sumber dana dari APBD dan 9 paket pelatihan yang sumber dananya APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pelatihan dengan menggunakan APBD sebanyak 12 kejuruan :

- 1) Service Sepeda Motor Injeksi (pelaksanaan di BLK)
- 2) Tukang pasang rangka atap baja ringan (pelaksanaan desa Gunung Raja)

- 3) Tata kecantikan (pelaksanaan desa Ujung Baru)
- 4) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan Desa Bati-Bati)
- 5) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Sumber Makmur)
- 6) Tukang rumah kayu (pelaksanaan Desa Kayu Abang)
- 7) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Suka Ramah)
- 8) Aluminium (pelaksanaan Desa Batu Tungku)
- 9) Digital Marketing (pelaksanaan Desa Ujung Batu)
- 10) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 11) Tukang pasang rangka atap baja ringan (pelaksanaan desa Kintap)
- 12) Fillet Welder SMAW 2F/PB (pelaksanaan Desa Asam-Asam)

Sedangkan pelatihan dengan menggunakan APBN sebanyak 9 kejuruan :

- 1) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 2) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 3) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 4) Computer Operator Assistant (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 5) Pembuatan Roti dan Kue (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 6) Menjahit pakaian Wanita dewasa (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 7) Practical Office Advance (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 8) Pemasangan instalasi otomasi industry (pelaksanaan BLK Pelaihari)
- 9) Plate Welder AMAW 3G-UP PF (pelaksanaan BLK Pelaihari)

Dari sejumlah pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh dinas maupun BLK Pelaihari diatas yang diikuti sebanyak 336 orang pencari kerja dan yang mengikuti Uji Kompetensi/UJK yaitu sebanyak 144 orang pada tahun 2023.

Selain pelatihan di dinas maupun di BLK Pelaihari, mereka juga mengikuti pelatihan di BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati dan BLK Komunitas Darussalam juga berhasil meningkatkan kompetensi 55 orang pencari kerja dari pelatihan dengan Kejuruan Komputer dengan sumber pembiayaan Mandiri, sedangkan 15 LPK Swasta berhasil melatih dengan peserta sebanyak 703 orang pencari kerja dan yang mengikuti Uji Kompetensi/UJK sebanyak 64 orang.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) dengan sumber dana APBD bagi 29 pencari kerja pada 3 perusahaan yaitu PT. Batu Gunung Mulia Putra Agro (PT. BGMPA), PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., PT. Maju Perkasa Indonesia (PT.MPI). Untuk pencari kerja dengan sumber dana APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan diikuti oleh 2 orang pencari kerja dari dan PT. Sinar Nusantara Industries. Peserta magang yang lulus dan kompeten nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Kemudian **Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja** ini juga didukung dengan indikator UPT BLK yaitu **“Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n”**, dimana pada tahun 2023 mampu terealisasi sebanyak 192 orang tenaga kerja juga sebanyak 192 orang atau dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebanyak 352 orang mengalami penurunan hal dimana pada tahun 2023 pelatihan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana APBN yaitu sebanyak 9 paket pelatihan saja, dibandingkan dengan tahun 2022 pelatihan yang menggunakan dana APBN yaitu sebanyak 15 paket pelatihan, sehingga

ini berpengaruh pada jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan yang mengikuti Uji Kompetensi/UJK.

Adapun kegiatan – kegiatan yang dilakukan di UPT BLK Pelaihari diantaranya Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja pada tahun 2023 yang dilaksanakan di BLK dengan dana APBD sebanyak 2 paket yaitu pelatihan Pembuatan Roti dan Kue sebanyak 1 paket dan pelatihan Service Sepeda Motor Injeksi sebanyak 1 paket. Sedangkan yang dilaksanakan di BLK dengan dana APBN sebanyak 9 paket yaitu pelatihan Pembuatan Roti dan Kue sebanyak 3 paket, pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa sebanyak 2 paket, pelatihan computer operator assistant 1 paket, pelatihan practical office advance sebanyak 1 paket, pelatihan pemasangan instalasi otomasi listrik industri sebanyak 1 paket dan pelatihan plate welder SMAW 3G UP PF sebanyak 1 paket.

Kemudian 10 paket yang dilaksanakan di desa dengan dana APBD yaitu pelatihan pemasangan baja ringan ada di 2 desa, Desa gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang dan Desa Kintap Kecamatan Kintap. Pelatihan tukang rumah kayu di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang. Pelatihan Potong Rambut dan Kecantikan di Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati. Pelatihan Digital Marketing di Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari. Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa di Desa Bati-Bati Kecamatan Bati. Pelatihan Fillet Welder SMAW 2F/PB ada di 3 desa, Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung, Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan dan Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong. Pelatihan Aluminium di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan.

b. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Dimana untuk menentukan besaran TKK dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Angka persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2023 adalah 96,42% meningkat 0,59 poin jika dibandingkan dengan TKK tahun 2022 yaitu 95,83%.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diatas 95% menggambarkan kondisi kesempatan kerja penuh (full employment) yaitu suatu keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia sepenuhnya untuk bekerja dalam suatu waktu. Pengangguran sebanyak 5 dari 95% inilah yang dinamakan pengangguran alamiah.

Adapun jika dibandingkan dengan TKK Provinsi Kalimantan Selatan, TKK Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi, dengan selisih 0,73% hal ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Tanah Laut lebih baik dibandingkan dengan kesempatan kerja tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Perbandingan TKK Kabupaten Tanah Laut dengan TKK Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perbandingan TKK Kab. Tanah Laut dengan Prov. Kalsel Tahun 2021 s/d 2023

	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Bekerja	2.109.427	2.092.225	2.079.681
Jumlah Angkatan Kerja	2.219.395	2.196.250	2.079.257
TKK (%) Prov. Kalsel	95,04	95,26	95,69
TKK (%) Kab. Tanah Laut	96,48	96,83	96,42

Adapun perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 s/d Tahun 2023

INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
ANGKATAN KERJA (Orang)	172.161	181.817	185.049	184.133	185.267
BEKERJA (Orang)	166.334	175.337	178.543	176.458	178.635
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,62	96,44	96,48	95,83	96,42

Sumber BPS Tanah Laut

Angka persentase Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2023 adalah 96,42% meningkat 0,59 poin jika dibandingkan dengan TKK tahun 2022 yaitu 95,83%. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) diatas 95% menggambarkan kondisi kesempatan kerja penuh (full employment) yaitu suatu keadaan dimana seseorang sekitar 95 persen dari angkatan kerja mampu dan bersedia sepenuhnya untuk bekerja dalam suatu waktu. Pengangguran sebanyak 5 dari 95 persen inilah yang dinamakan pengangguran alamiah.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada Tingkat Kesempatan Kerja adalah :

- a. Usia tenaga kerja

- b. Jumlah angkatan kerja yang tersedia. Besarnya permintaan total masyarakat.
- c. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta.
- d. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan.

Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun sektor informal terbuka luas di Kabupaten Tanah Laut. Jika dibandingkan dengan target pada maka tingkat kesempatan kerja pada tahun 2023 jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2022, tahun 2023 terjadi kenaikan kesempatan kerja dimana pelayanan penempatan tenaga kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (pada sektor formal) adalah 24,57% dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 281 orang dari total 2045 orang pencari kerja.

Sementara pada tahun 2022 terjadi penurunan dalam jumlah pencari kerja terdaftar yaitu 889 orang dan yang ditempatkan adalah 119 orang pada tahun 2022 atau dengan persentase sebesar 13,38%. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mendukung **Meningkatnya Kesempatan Kerja** maka didukung juga dengan indikator "**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**" yang ada pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Dimana pada tahun 2023 mampu terealisasi sebesar 24,57% atau sebanyak 281 orang, dari

yang ditargetkan sebesar 6,5% atau sebanyak 14 orang dari total tenaga kerja yang terdaftar 2045 orang atau dengan kata lain memperoleh capaian 378%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mana terealisasi sebesar 11,39% maka ditahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,18%. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal pada tahun 2023 dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan tren peningkatan ini antara lain adanya pejabat fungsional pengantar kerja sebanyak satu orang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sehingga fungsi perantaraan kerja mulai berjalan sebagaimana mestinya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan dalam Penyusunan dokumen RTK Mikro, yang diikuti oleh 8 Perusahaan yaitu PT. JBG, PT WPR, PT. CBP Sukses Makmur, Tbk, PT BGMPA, PT. MPI, RSBCM dan RSIA Ibunda. Dokumen ini akan disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyusun rencana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. Melaksanakan sosialisasi dan pencarian lowongan kerja bagi pencari, memberikan pelatihan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar mereka lebih siap memasuki dunia kerja, melakukan penjangkaran calon wirausaha baru melalui kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur.

4. Melakukan pengawasan ke kecamatan atau perusahaan yang ada di kecamatan tersebut terkait dengan keberadaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang didirikan dan beroperasi di Kabupaten Tanah Laut.

c. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial.

Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial sebagai salah satu kinerja utama dengan indikator persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial merupakan sasaran strategis ke 3 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang didapat dari jumlah pengurangan kasus tahun berjalan dibanding dengan jumlah kasus tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100% :

$$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1} \times 100\% = \text{Penurunan Kasus}$$

Pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) kasus yang masuk untuk dibantu penyelesaiannya oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah kasus yang masuk yang harus diselesaikan mengalami penurunan, dimana untuk tahun 2022 jumlah kasus perselisihan yang masuk yaitu sebanyak 5 (lima) kasus, dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 80% atau mampu terealisasi sebesar 20% dari yang ditargetkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 42,5% dengan capaian sebesar 40,06%

Untuk mengetahui berapa kasus yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama ini dapat dilihat dari indikator “**Cakupan Perselisihan Hubungan**

Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Kerjasama (PB)” pada Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang didapat dari jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dikali 100%. Dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{jumlah kasus yang difasilitasi}} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

Pada tahun 2023 terdapat 4 kasus masuk mampu diselesaikan sebanyak 1 kasus melalui Perjanjian Bersama atau sebesar 25% dari yang ditargetkan sebesar 32% dengan capaian 78,13%. Dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat 5 kasus masuk yang mampu diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebanyak 2 kasus atau sebesar 40%.

Berikut disajikan data tahapan kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut rentang waktu 2020 sampai dengan 2023.

Tabel 2.4

DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Bo Atby Nuh	PT. Batu Mas Timur		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
2	Joko Supriyanto	PT. Finansia Multi Finance		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
3	H. Ashuri dkk.	PT. Bhakti Keluarga		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama (PB)
4	Mahyudin Fitri dkk	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Selesai dengan Anjuran Mediator

Tabel 2.5

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific			V	Anjuran Mediator/PHI
2	Sdr. Harry Santoso	PT. Sinar Nirwana Sari		V		Perjanjian Bersama / Bekerja kembali
3	Sdr. Zainal Hakim (Perwakilan pekerja PT. SWA)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur			V	Anjuran Mediator/PHI
4	Sdr. Hartono dkk	PT. Sarana Subur Agridotama		V		Anjuran Mediator/PHI
5	Sdri. Dewi Yana	PT. Mitra Citra Gemilang		V		Perjanjian Bersama

Tabel 2.6

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Tabel 2.7

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana PDRB tahun 2022 sebesar 10,50%, sedangkan PDRB tahun 2023 mengalami **kenaikan 0,09 poin** menjadi 10,59%. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh kinerja sub kategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Tabel 2.8
Peningkatan Produktivitas Sektor Industri

	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	12,30	12,10	10,50	10,59
Pertumbuhan Sektor industri Pengolahan (%)	-4,27	5,01	3,85	5,33

Pertumbuhan sektor industri juga selalu tumbuh positif pada kisaran 2,5-7,5 persen dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang

terkontraksi (-4,27) persen akibat pandemi Covid-19. Pada 2023 tetap tumbuh positif akan tetapi melambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 2023 pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 5,33% hal ini menunjukkan secara umum sektor industri pengolahan selalu tumbuh positif namun berfluktuasi dan mengalami penguatan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan diantaranya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Berbahan Limbah Kayu Ulin berlokasi di Desa Riam Adungan, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari PT. Scala Custom Banjarbaru, pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jamur Tiram di Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang dan Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap.
2. Mengadakan Lomba Kreasi Desain Pengembangan Produk Sasirangan,
3. Melaksanakan kegiatan Magang Pengembangan Produk Sasirangan di BBSPJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta bagi para pelaku IKM.
4. Melakukan fasilitasi dan pembinaan Industri dalam rangka standarisasi industri
5. Melakukan penilaian Teknologi Tepat Guna di Kab. Tanah Laut.
6. Mengikuti berbagai even pameran untuk mempromosikan produk IKM Kab. Tanah Laut.

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Promosi Produk IKM, kita memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan.

Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

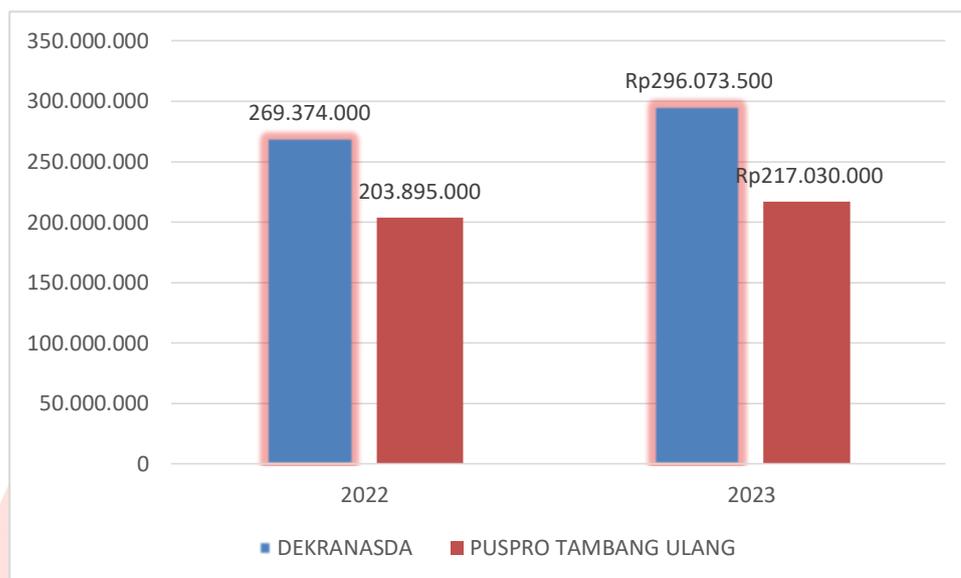
Tabel 2.9
Rekafitulasi Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2023
Pada Dekranasda dan Pusat Promosi

NO	BULAN	DEKRANASDA (Rp)	PUSPRO (Rp)
1	JANUARI	Rp.32.385.000	Rp20.332.000
2	FEBRUARI	Rp26.987.000	Rp9.431.000
3	MARET	Rp16.354.000	Rp19.546.000
4	APRIL	Rp16.329.000	Rp11.922.000
5	MEI	Rp42.283.000	Rp16.814.000
6	JUNI	Rp18.044.000	Rp24.006.000
7	JULI	Rp16.632.000	Rp25.604.000
8	AGUSTUS	Rp27.107.000	Rp20.059.000
9	SEPTEMBER	Rp24.269.500	Rp29.607.000
10	OKTOBER	Rp24.468.000	Rp8.985.000
11	NOVEMBER	Rp26.546.000	Rp17.788.000
12	DESEMBER	Rp24.669.000	Rp12.936.000
	TOTAL	Rp296.073.500	Rp217.030.000
	Rata-rata	Rp24.672.792	Rp18.085.833

Dari tabel dapat dikatakan pada Tahun 2023, Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 24.672.792/bulan dan di Pusat Promosi rata-rata penjualan Rp. 18.085.833/bulan.

disnakerind
K O M P E T I T I F

Grafik 2.10
Jumlah Penjualan Produk IKM Tahun 2022 dan 2023 Pada Dekranasda dan Puspro



Selain dari Dekranasda dan Puspro Tambang Ulang, kami juga melakukan promosi produk melalui berbagai event pameran dan juga menggunakan mobil promosi Dekranasda. Hasil Penjualan Produk IKM Selama Tahun 2023 dari mobil Promosi adalah sebesar Rp. 99.663.000,- dan dari berbagai even lain yang di ikuti Rp. 79.021.000,-.

Tabel 2.11
Rekafitulasi Event Yang Diikuti dengan Mobil Promosi Selama Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Kecamatan	Hasil Penjualan Produk IKM
1	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 96	Damit Hulu	Batu Ampar	1.692.000
2	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 97	Panggung Baru	Pelaihari	170.000
3	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 98	Martadah	Tambang Ulang	1.490.000
4	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Muswil Muhammadiyah Se kalsel	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.862.000
5	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara BGMPA	Batu Ampar BGMPA	Batu Ampar	31.415.000
6	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 99	Panggung	Pelaihari	430.000
7	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 100	Batu Tungku	Panyipatan	5.036.000
8	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 101	Kintapura	Kintap	4.205.000
9	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 102	Atu-atu	Pelaihari	732.000

10	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 103	Singai Riam	Pelaihari	820.000
11	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 104	Batilai	Takisung	1.015.000
12	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 105	Damar Lima	Batu Ampar	730.000
13	Melaksanakan Mobil Expo pada Acara Hut Satpol PP	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	411.000
14	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 106	Pemuda	Pelaihari	466.000
15	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 107	Sambangan	Bati-bati	1.186.000
16	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pasar Murah Oleh Kopdag 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	120.000
17	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 108	Sungai Cuka	Kintap	2.692.000
18	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 109	Ranggang	Takisung	302.000
19	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 110	Sungai Pinang	Tambang Ulang	933.000
20	Mobil Expo pada Partisipasi Pasar Muarah di Kecamatan Kurau	Halaman Kantor Kec. Kurau	Kurau	875.000
21	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Sepak Bola Dalas Hangit Kodim 1009	Lap Kodim 1009	Pelaihari	305.000
22	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 111	Ujung	Bati-bati	1.143.000
23	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 112	Kurau Utara	Bumi Makmur	1.522.000
24	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 113	Ujung Batu	Pelaihari	275.000
25	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 114	Maluka Baulin	Kurau	1.332.000
26	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 115	Telaga	Pelaihari	1.228.000
27	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 116	Pandahan	Bati-bati	1.560.000
28	Mobil Expo pada Event Tala Educatoo Expo (H+1)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.871.000
29	Mobil Expo pada Event Tala Educatoo Expo (H+2)	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.957.000
30	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 117	Kintap Kecil	Kintap	3.232.000
31	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 118	Ambungan	Pelaihari	150.000
32	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pelaksanaan Pasar Murah di Lapangan Balai Desa Tanjung Dewa	Lap Balai Desa	Panyipatan/ Tanjung Dewa	260.000
33	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 119	Batakan	Panyipatan	1.345.000
34	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 120	Bumi Jaya	Pelaihari	1.160.000
35	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 121	Bentok Kampung	Bati-bati	2.311.000
36	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi Prov Kalsel	Best World Kindai Hotel	Banjarmasin	1.873.000
37	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 122	Kunyit	Bajuin	588.000
38	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 123	Kurau	Kurau	983.000
39	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 124	Tampang	Pelaihari	813.000
40	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 125	Jilatan	Batu Ampar	1.784.000
41	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Pembukaan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsung	658.000

42	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 127	Handil Maluka	Bumi Makmur	496.000
43	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Tambak Karya	Kurau	848.000
44	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 128	Ranggang Dalam	Takisung	692.000
45	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Rapat Apkasi di Tangerang	ICE BSD Tangerang	Banten	8.252.000
46	Melaksanakan Mobile Expo Pada Partisipasi Pasar Murah acara HKKB Murakata	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	1.105.000
47	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Penutupan TMMD Ke 117	Lapangan 17 Agustus	Telaga Langsung	632.000
48	Melaksanakan Mobil Expo pada Event Manunggal Tuntung Pandang Ke 129	Pantai Harapan	Bumi Makmur	952.000
49	Mobile Expo pada even Hari Pramuka	Halaman Kantor Bupati	Pemda Tala	754.000

99.663.000

Tabel 2.12
Pameran Dan Mini Expo Yang Diikuti Selama Tahun 2023

No	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan Desa	Tempat	Hasil Penjualan Produk IKM
1	01-06 Mar 23	INACRAFT 2023 (Jakarta Covention Center)	JCC	Jakarta	5.430.000
2	10-12 Mar 23	Banjarmasin Sasirangan Festifal (BSF) 2023	Menara Pantau Siring	Banjarmasin	7.100.000
3	Mar-23	Indonesia Tourism & Trade Investment Expo Riorita Batam	Batam	Batam	4.759.000
4	22-23 Mei 2023	Promosi Produk Unggulan Kabupaten pada Kegiatan Rakornas Penumbuhan dan Pengembangan IKM	Galaxy Hotel	Banjarmasin	875.000
5	07 s.d 09 jul 2023	Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional XLV Kecamatan Kintap	Desa Kintap	Kintap	6.797.000
6	01 Sept 2023	Mini Expo Pada event lomba kain sasirangan	Sarantang saruntung	pemda Tala	621.000
7	01 Sept 2023	Bazar MTQ Nasional Ke-34 Banjarbaru Tahun 2023 H1	Lapangan Murjani	Banjarbaru	7.355.000
8	05-07 Sep 2023	Gema Al-Qur'an Tanah Laut Tahun 2023 H1	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	15.001.000
9	12-18 Sep 2023	Pameran Kriyanusa Tahun 2023 H1	Jakarta Convention Center, Jakarta	Jakarta	9.120.000
10	21-24 September 2023	Pekan Raya Banjarmasin H1	Siring Pantau Banjarmasin	Banjarmasin	7.908.000
11	15 s.d 20 November 2023	Indokraf Expo 2023	Mataram Mall, Lombok	Lombok Nusa Tenggara Barat	3.747.000
12	30 Nop sd 03 Des 2023	Tala Expo 2023	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pelaihari	2.566.000
13	07 sd 13 Des 2023	Festifal Kuliner Tanjung Tabalong	Tanjung Expo Center, Mabuun	Mabuun Tanjung Tabalong	7.742.000
			TOTAL		79.021.000

Untuk **Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri**, didukung dengan 2 indikator kinerja pada Bidang Perindustrian yaitu indikator **“Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri”** dan indikator **“Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri”**.

Analisa “Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri”

Seiring dengan kebijakan nasional Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut terus melakukan pembinaan kepada IKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data yang dihimpun jumlah IKM di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 5.523 IKM dengan sebaran sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah IKM di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM 2023			
			Data Lama	Data Baru	Tutup/Tidak Aktif	TOTAL Data Aktif
1	Bajuin	Bajuin	17	6	0	23
		Galam	28	0	0	28
		Ketapang	29	0	0	29
		Kunyit	34	7	0	41
		Pemalongan	14	0	0	14
		Sungai Bakar	49	5	0	54
		Tanjung	13	31	0	44
		Tebing Siring	17	30	0	47
		Tirta Jaya	28	0	0	28
		Banyu Irang	53	0	0	53
2	Bati-Bati	Bati-Bati	43	0	0	43
		Bentok Darat	57	0	0	57
		Bentok Kampung	25	0	0	25
		Benua Raya	15	30	0	45
		Kait-Kait	26	0	0	26
		Kait-Kait Baru	38	0	0	38
		Liang Anggang	72	0	0	72
		Nusa Indah	33	0	0	33
		Padang	39	33	0	72
		Pandahan	139	0	0	139
Sambangan	17	18	0	35		
Ujung	43	5	0	48		

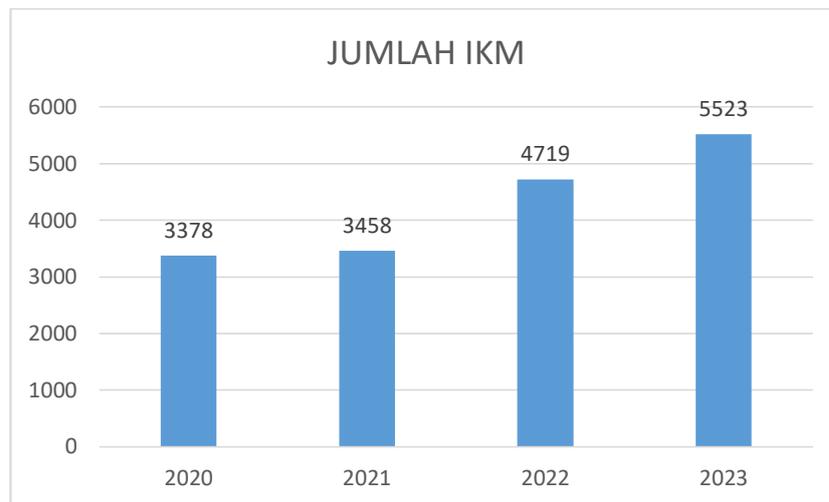
		Ujung Baru	34	8	0	42
3	Batu Ampar	Ambawang	9	23	0	32
		Batu Ampar	37	0	0	37
		Bluru	20	0	0	20
		Damar Lima	13	0	0	13
		Damit	44	0	0	44
		Damit Hulu	30	0	0	30
		Durian Bungkok	52	0	0	52
		Gunung Mas	36	0	0	36
		Gunung Melati	18	21	0	39
		Jilatan	16	0	0	16
		Jilatan Alur	10	19	0	29
		Pantai Linuh	10	0	0	10
		Tajau Mulya	20	0	0	20
		Tajau Pecah	69	0	0	69
		4	Bumi Makmur	Bumi Harapan	27	6
Handil Babirik	59			5	0	64
Handil Birayang Atas	13			16	0	29
Handil Birayang Bawah	3			2	0	5
Handil Gayam	73			5	0	78
Handil Labuan Amas	10			0	0	10
Handil Maluka	20			0	0	20
Handil Suruk	31			0	0	31
Kurau Utara	57			0	0	57
Pantai Harapan	15			0	0	15
Sungai Rasau	15			2	0	17
5	Jorong	Alur	20	36	0	56
		Asam Asam	18	0	0	18
		Asam Jaya	55	0	0	55
		Asri Mulya	16	0	0	16
		Batalang	4	7	0	11
		Jorong	27	0	0	27
		Karang Rejo	28	0	0	28
		Muara Asam Asam	17	25	0	42
		Sabuhur	78	16	0	94
		Simpang Empat Sungai Baru	64	0	0	64
		Swarangan	20	5	0	25
6	Kintap	Bukit Mulia	16	0	0	16
		Kebun Raya	36	0	0	36
		Kintap	28	11	0	39
		Kintap Kecil	40	0	0	40
		Kintapura	15	0	0	15
		Mekar Sari	21	29	0	50

		Muara Kintap	25	0	0	25
		Pandan Sari	43	0	0	43
		Pasir Putih	15	24	0	39
		Riam Adungan	4	0	0	4
		Salaman	5	0	0	5
		Sebamban Baru	21	0	0	21
		Sumber Jaya	46	0	0	46
		Sungai Cuka	52	0	0	52
7	Kurau	Bawah Layung	11	60	0	71
		Handil Negara	81	0	0	81
		Kali Besar	35	26	0	61
		Kurau	31	0	0	31
		Maluka Baulin	61	0	0	61
		Padang Luas	50	0	0	50
		Raden	11	11	0	22
		Sarikandi	33	0	0	33
		Sungai Bakau	12	12	0	24
		Tambak Karya	25	0	0	25
		Tambak Sarinah	46	0	0	46
8	Panyipatan	Batakan	173	17	0	190
		Batu Mulya	29	15	0	44
		Batu Tungku	35	0	0	35
		Bumi Asih	19	24	0	43
		Kandangan Baru	36	0	0	36
		Kandangan Lama	41	0	0	41
		Kuringkit	55	10	0	65
		Panyipatan	63	0	0	63
		Suka Ramah	36	0	0	36
		Tanjung Dewa	31	0	0	31
		Ambungan	29	0	0	29
		Atu-Atu	11	0	0	11
		Bumi Jaya	46	0	0	46
		Guntung Besar	13	0	0	13
		Kampung Baru	23	0	0	23
9	Pelaihari	Kelurahan Angsau	14	0	0	14
		Kelurahan Karang Taruna	48	4	0	52
		Kelurahan Pabahanan	38	0	0	38
		Kelurahan Pelaihari	45	0	0	45
		Kelurahan Sarang Halang	19	0	0	19
		Panggung	12	0	0	12
		Panggung Baru	20	0	0	20
		Panjaratan	17	0	0	17
		Pemuda	36	0	0	36

		Sumber Mulia	25	0	0	25
		Sungai Riam	38	0	0	38
		Tampang	17	0	0	17
		Telaga	27	0	0	27
		Tungkaran	7	0	0	7
		Ujung Batu	29	0	0	29
10	Takisung	Batilai	57	0	0	57
		Benua Lawas	59	0	7	52
		Benua Tengah	61	0	0	61
		Gunung Makmur	53	70	0	123
		Kuala Tambangan	38	0	0	38
		Pagatan Besar	69	0	0	69
		Ranggang	58	0	0	58
		Ranggang Dalam	18	0	0	18
		Sumber Makmur	84	0	0	84
		Tabanio	32	46	0	78
		Takisung	146	40	0	186
		Telaga Langsat	31	8	0	39
		11	Tambang Ulang	Bingkulu	14	10
Gunung Raja	61			0	0	61
Kayu Abang	12			17	0	29
Martadah	22			0	0	22
Martadah Baru	24			0	0	24
Pulau Sari	57			14	0	71
Sungai Jelai	28			0	0	28
Sungai Pinang	27			0	0	27
Tambang Ulang	56			2	0	58
TOTAL			4719	811	7	5523

disnakerind
K O M P E T I T I F

Grafik 2.14
Jumlah IKM Tahun 2020 sd 2023 di Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pendataan tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 4.719 industri menjadi 5.523 industri atau terjadi peningkatan 17,03 % .

Dari total keseluruhan jumlah IKM tersebut sebagaimana tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pembinaan-pembinaan kepada para IKM agar mereka diharapkan bisa berinovasi dengan memanfaatkan produk-produk unggulan di daerahnya, baik itu hasil laut, perikanan, perkebunan, ataupun bahan-bahan alam disekitarnya.

Untuk membantu dan mendukung IKM agar lebih inovasi dan kreatif, pembinaan yang diberikan yaitu melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan antara lain Fasilitasi Halal, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan fasilitasi TKDN dimana fasilitasi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan daya saing produk IKM di pasaran.

Kemudian dalam rangka mengembangkan inovasi, juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas para pelaku usaha IKM dan beberapa kegiatan pelatihan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan Berbahan Limbah Kayu Ulin berlokasi di Desa Riam Adungan, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari PT. Scala Custom Banjarbaru.
- ❖ Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Jamur Tiram di Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang.
- ❖ Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari Feraria Putri Sasirangan.
- ❖ Pelatihan Teknis Produksi Pembuatan Sasirangan Ringkel berlokasi di Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap dengan jumlah peserta 20 orang dengan instruktur dari Almanah Sasirangan.
- ❖ Kegiatan Lomba Kreasi Desain Pengembangan Produk Sasirangan.
- ❖ Kegiatan Magang Pengembangan Produk Sasirangan di BBSPJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Persentase IKM yang sudah mengembangkan inovasi dan kreativitas industri sebesar 216%, hasil ini dapat dihitung dari jumlah IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi target IKM mengembangkan inovasi dan kreativitas industri= $(54/25) \times 100\% = 216\%$.

Berdasarkan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi diberikan sebagai upaya untuk meningkat inovasi dan kreativitas industri, tahun 2023 ada 54 IKM yang sudah mengembangkan inovasi dan kreativitas pada usaha industrinya.

Analisa Cakupan Fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri Jorong atau biasa kita kenal dengan sebutan Kawasan Industri Jorong (KIJ) memiliki luas sebesar 957,73 Ha. Kawasan Industri Jorong dikelola oleh PT. Wahyu Putra Ramadhan, adapun Lokasi KIJ berada di Desa Swarangan, Desa Karang Rejo, Desa Muara Asam-asam, Desa Asam Jaya, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Industri Jorong merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Adapun pengelola dan pelaksana PSN Kawasan Industri Jorong yang ditetapkan adalah PT Wahyu Putra Ramadhan. Dengan dasar tersebut, mulai tahun 2022 PT Wahyu Putra Ramadhan menjajaki untuk melengkapi seluruh legalitas usaha yang disyaratkan sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Saat ini PT. WPR sedang mengurus izin Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai kelengkapan dalam memperoleh Izin Usaha kawasan Industri (IUKI).

Pengembangan kawasan untuk industri sudah mencakup 83% yang dapat dihitung dari Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri = $(5/6) \times 100\% = 83\%$. Adapun 6 tahapan menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 pasal 9 adalah sbb :

- a. pemilihan lokasi;

Lokasi Kawasan Industri Jorong sesuai dengan Perda RTRW Kab. Tanah Laut nomor 6 Tahun 2023 berlokasi di Desa Swarangan, Desa Karang Rejo, Desa Muara Asam-asam, Desa Asam Jaya, Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 957,73 Ha.

Gambar 2.1
Peta Lokasi Kawasan Industri Jorong



b. perizinan;

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) OSS Nomor 10072310316301001
- Perizinan Usaha Berbasis Resiko (OSS) No izin : 91200049624290007
- Nomor Induk Berusaha : 9120004962429

c. pengadaan tanah;

Tanah yang dimiliki oleh PT. WPR seluas 65 Ha dan saat ini sedang proses perolehan hak atas tanah dan sedang berproses di ATR/BPN.

d. pematangan tanah;

Pematangan tanah adalah proses pembentukan atau pembersihan lahan sebelum digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan perumahan atau proyek konstruksi lainnya. Pematangan tanah meliputi antara

lain penyiangan, penggalian, pemindahan, pembuatan sistem drainase dll. Tahapan pematangan tanah di KIJ belum optimal dilaksanakan dan masih berproses.

e. pembangunan infrastruktur; dan

Di Kawasan Industri Jorong telah dibangun kantor pengelola, stok pile dan jalan kawasan.

f. pengelolaan

Berdasar Surat Bupati Tanah Laut No. 530/14/BAPIND/XI/2022 tanggal 22 November 2022 dan Surat Ketua Tim KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) No. IPW/07/D.VI.M.EKON.KPPIP/01/2023 tanggal 12 Januari 2023, pengelola dan pelaksana PSN KI Jorong adalah PT. Wahyu Putra Ramadhan dengan KBLI 68130 (Kawasan Industri).

e. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Disnakerind melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui upaya perubahan - perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengacu pada 8 (Delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari Tingkat kinerja pelayanan Disnakerind, menginventarisasi harapan dan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam hal peningkatan mutu Pelayanan dan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan kebijakan terkait optimalisasi layanan public.

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind, nilai rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** Disnakerind mengalami peningkatan yaitu sebesar **90,66** dengan **Predikat A (Sangat Baik)**, dimana nilai pada tahun sebelumnya yaitu **90,34** dengan **Predikat A (Sangat Baik)**.

Terkait dengan Pembangunan Zona Integritas pada **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut**, berdasarkan hasil **Evaluasi Pembangunan Zona Integritas** dari Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendapatkan **nilai 93,20** dimana predikat ini diberikan kepada pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public.

Adapun ruang lingkup evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Disnakerind sebagai berikut :

1. Pemenuhan dokumen atas hasil yang dicapai pada komponen Pengungkit, Reform dan Komponen Hasil dari Rencana Kerja Zona Integritas;
2. Memastikan hal – hal terkait pencapaian kinerja, yaitu :
 - a) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK;
 - b) Hasil Evaluasi Penerapan SAKIP
 - c) Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN / LHKASN;
 - d) Komitmen dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas
 - e) Kualitas implementasi dan komponen pengungkit serta data dukung implementasinya
 - f) Inovasi – inovasi yang telah dilakukan
 - g) Penilaian Hasil Survey yang diperoleh, yaitu Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survey Persepsi Kuliatas Pelayanan (IPKP)
 - h) Tren pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya
 - i) Penerapan Manajemen Resiko

Dan sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkup Disnakerind, kami mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi sebagaimana Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2023 ini Disnakerind melakukan Survey Perilaku Anti Korupsi di lingkup Disnakerind dimana responden dari survey ini adalah para *user* / Masyarakat yang mendapatkan layanan di lingkup Disnakerind. Adapun hasil **Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023** yaitu sebesar **93,64** dengan predikat **A (Sangat Baik)**.

Dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 821 – KUM / 2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah serta Penetapan Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik, menyatakan bahwa **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut sebagai perangkat daerah yang berkinerja “SANGAT BAIK” dengan Kategori A.**

Dari Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, penilaian Reformasi Birokrasi masih berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 sampai dengan penilaian tanggal 10 Juni 2022 yaitu sebesar **34,17 (94,13%)** atau termasuk dalam **Kategori AA (Istimewa)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 8 (delapan) Area Perubahan.). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian semakin akuntabel, berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan adanya pembenahan – pembenahan salah satunya melalui inovasi tidak hanya pelayanan pada kesekretariatan tapi

juga pada pelayanan teknis bidang. Hal ini untuk melakukan perbaikan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, tata kelola administrasi, tata kelola perencanaan dan penganggaran, tata Kelola layanan publik yang baik berbasis digital dan mengikuti perkembangan regulasi dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Inovasi – inovasi yang dikembangkan oleh Disnakerind pada tahun 2023 antara lain:

1. *Smart Office, Smart Service (SOSS)* dengan berbagai fitur layanan kesekretariatan baik Umum dan Kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan
2. Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)
3. Pendataan Terintegrasi Pelayanan dan Pemasaran Produk (Pelanduk)
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rentan Daerah (Ji-Stand)

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada tahun 2022 Disnakerind meluncurkan sebuah Inovasi yang setiap tahun mengalami pengembangan fitur, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan *Online System Melalui Smart Office, Smart Service (SOSS)* dan *Sahabat Layanan Masyarakat (SALAM)* yang digunakan oleh seluruh pegawai di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh pegawai, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melakukan beberapa terobosan untuk meringankan tugas-tugas administratif yang diberikan kepada pegawai. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan mempermudah berbagai proses kegiatan administratif melalui pengembangan alat kerja berbentuk aplikasi berbasis Web dan Android, yaitu Aplikasi **Smart Office – Smart Service (SOSS)**;

Aplikasi *Smart Office – Smart Service (SOSS)*, merupakan alat kerja Sekretariat dalam kegiatan administrasi pemerintahan, sekaligus alat kerja Bidang untuk kegiatan pelayanan publik yang dibangun dalam dua aplikasi berbeda yang terintegrasi (*Dual Sides App System*), yaitu Aplikasi SOSS untuk Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dan Aplikasi SOSS untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan mengusung motto *One Record, One Thousand Reports*.

SOSS adalah Aplikasi berbasis Web (*Web-Based App*) dan Android yang menerapkan sistem aplikasi dua arah (*Dual Sides App System*), yaitu dua aplikasi berbeda yang terintegrasi antara Pegawai DISNAKERIND, dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi Pegawai adalah sebagai alat kerja untuk berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, dan sebagai pengelola (Admin) untuk berbagai layanan publik DISNAKERIND.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mengakses berbagai informasi dan fitur layanan publik berbasis online yang dikembangkan oleh DISNAKERIND.

Registrasi pada Aplikasi SOSS untuk pegawai hanya bisa dilakukan oleh pegawai DISNAKERIND dan UPT BLK dengan merujuk pada data Nomor Identitas PNS, yaitu NIP, dan Nomor Identitas PTT, yaitu NR-PTT.

Sedangkan Registrasi Aplikasi SOSS untuk publik dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan merujuk pada Nomor Identitas Kependudukan.

Otoritas akses Aplikasi SOSS untuk pegawai diatur berdasarkan otoritas tugas dan fungsi jabatannya pada struktur organisasi DISNAKERIND.

Menu Smart Office

- (1) Menu Smart Office berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DISNAKERIND, serta Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK.
- (2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Office terdiri dari:
 - a. Sub Menu Umum
 1. Aplikasi Register Surat Masuk
 2. Aplikasi Register Surat Keluar
 3. Aplikasi Register Nota Dinas
 4. Aplikasi Register Telaahan Staf
 5. Aplikasi Register Rekomendasi
 6. Aplikasi Register SK
 7. Aplikasi Register SPT dan SPPD (Monas)
 8. Aplikasi Register Penggunaan Mobil Dinas dan BBM (Krisna)
 9. Aplikasi Register Penggunaan Rumah Dinas BLK
 - b. Sub Menu Kepegawaian
 1. Aplikasi Register Kehadiran Pegawai

2. Aplikasi Data Pegawai
3. Aplikasi Data Jabatan
- c. Sub Menu Perencanaan
 1. Aplikasi Penyusunan RKA
 2. Aplikasi Renja dan Renstra
- d. Sub Menu Keuangan
 1. Aplikasi Penatausahaan Kinerja dan Keuangan (Si Kijang).

Menu Smart Service

- (1) Menu Smart Service berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik pada Bidang P2TK, Bidang HIJSTK, Bidang Perindustrian, dan UPT BLK pada DISNAKERIND.
- (2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Service terdiri dari:
 1. Sub Menu Bidang P2TK
 - a. Aplikasi Pasar Kerja
 - b. Aplikasi Karir Hub
 2. Sub Menu Bidang HIJSTK
 - a. Aplikasi Manajemen Norma Tenaga Kerja.
 - b. Aplikasi Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 3. Sub Menu Bidang Perindustrian
 - a. Aplikasi Pendataan Industri
 - b. Aplikasi Pencatatan Penjualan Dekranasda dan Puspro
 4. Sub Menu UPT BLK
 - a. Aplikasi Data Peserta Pelatihan
 - b. Aplikasi Data Alumni Pelatihan

Menu Aplikasi SALAM.

Adapun menu dan sub menu Aplikasi SALAM terdiri dari :

1. Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja :
 - a. Pasar Kerja.
 - b. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.
2. Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - a. SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Norma Kerja).
 - b. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.
3. Pelayanan Perindustrian.
 - a. GAYATRI (Gerakan Pemberdayaan Industri).
 - b. Toko Dekranasda.
 - c. Pusat Promosi.
 - d. Dan menu link aplikasi eksternal lainnya.

Untuk mendukung **Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**, didukung dengan 2 indikator pada sekretariat yaitu indikator **“Nilai SAKIP Disnakerind”** dan indikator **“Nilai Reformasi Birokrasi”**.

Analisa indikator Nilai SAKIP Disnakerind

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut SKPD Nomor 700/247/LHE AKIP-Insp/2022 tanggal 23 Juni 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan

- kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut :
- a. Renstra SKPD;
 - b. Renja SKPD;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. Perjanjian Kinerja (PK);
 - f. Cascading/Pohon Kinerja;
 - g. Laporan Kinerja; dan
 - h. Dokumen lain yang mendukung.
2. Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai SAKIP Disnakerind .
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai sebesar 81,55 dengan kategori **A (Memuaskan)** dimana nilai tersebut menggambarkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
4. Nilai sebagaimana diberikan tersebut merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Perencanaan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 24,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (memuaskan);
 - b. Pengukuran Kinerja, diperoleh nilai sebesar 24,60% dari bobot sebesar 30% dengan kategori A (Memuaskan);

- c. Pelaporan Kinerja, diperoleh nilai sebesar 11,85% dari bobot sebesar 15% dengan kategori BB (Sangat Baik);
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diperoleh nilai sebesar 20,50% dari bobot sebesar 25% dengan kategori A (Memuaskan).
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dapat diperoleh nilai sebesar 100%.

Dari hasil nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan nilai yaitu sebesar **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)** dibandingkan dengan nilai tahun 2022 yaitu dengan nilai sebesar **83,20** kategori **A (Memuaskan)** memang mengalami penurunan yaitu sebesar **1,65 poin**, hal ini dikarenakan ada indikator penilaian yang berbeda pada tahun 2023 yang sebelumnya tidak ada di tahun 2022, salah satunya dengan memasukkan perbandingan secara nasional, provinsi maupun kabupaten, dan ini juga berdampak kepada hasil nilai SAKIP disemua SKPD.

Akan tetapi Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2023 yaitu sebesar **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)** jauh lebih baik dibandingkan dengan NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dengan nilai sebesar **67,52** atau selisih **14,03 poin**, dan juga dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai sebesar **81,21** sedikit lebih baik dengan selisih **0,34 poin**.

Dari hasil Nilai SAKIP Disnakerind yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu dengan nilai **81,55** dengan kategori **A (Memuaskan)**, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memperoleh peringkat ke 2 sebagai SKPD yang berkinerja terbaik dari seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut. Hasil ini lebih baik

dibandingkan dengan tahun 2022, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memperoleh peringkat ke 3 sebagai SKPD yang berkinerja terbaik dari seluruh SKPD di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai sebesar **83,20** kategori **A (Memuaskan)**.

Analisa Indikator Nilai RB Disnakerind.

Dalam upaya meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dimana nilai SAKIP Disnakerind dan Nilai Reformasi Birokrasi menjadi indikator kinerja utama yang menjadi target capaian pada Sekretariat, Sekretariat Disnakerind melakukan upaya untuk melakukan perubahan - perubahan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang diarahkan pada 8 (Delapan) area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45 / 821 – KUM / 2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah serta Penetapan Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik, menyatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut sebagai perangkat daerah yang berkinerja **“SANGAT BAIK” dengan Kategori A.**

Secara keseluruhan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dapat tersaji dalam tabel sebagai berikut:



disnakerind
K O M P E T I T I F

Tabel 2.15
Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)			
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)				8.573.231.733	1.292.405.155	2.386.399.029	1.581.945.774	533.479.501	5.794.229.459	67,59%	5.794.229.459	0,00%									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()			5	4.506.327	1	3	600.000	3	3.068.763	5	3.668.763	100,00%	81,41%	5,00	3.668.763	0,00%	0,00%				
		Ev aluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ()			4	6.727.933	3	3	-	3	4.406.295	4	200.000	4	4.606.295	100,00%	68,47%	4,00	4.606.295	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)			100	7.680.545.221	25	42	2.178.331.025	-	1.349.369.231	-	452.153.762	-	5.057.836.638	0,00%	65,85%	0,00	5.057.836.638	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)			12	7.674.532.981	3	6	2.177.531.025	9	1.348.969.231	12	451.353.762	12	5.055.436.638	100,00%	65,87%	12,00	5.055.436.638	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)			5	6.012.240	2	3	800.000	3	400.000	5	800.000	5	2.400.000	100,00%	39,92%	5,00	2.400.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)			100	185.189.154	1	1	37.121.410	-	47.502.950	-	9.660.700	-	159.028.835	0,00%	85,87%	0,00	159.028.835	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			8	8.712.737	2	4	2.868.600	8	2.936.100	8	5.804.700	100,00%	66,62%	8,00	5.804.700	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)			17	33.979.197	10	12	2.400.000	15	8.749.600	17	3.800.400	17	25.912.700	100,00%	76,26%	17,00	25.912.700	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			26	17.075.542	20	22	-	26	6.011.050	26	1.455.500	26	14.188.000	100,00%	83,09%	26,00	14.188.000	0,00%	0,00%		

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	4	37.451.678	1	6.196.000	1	4.308.600	2	15.427.200	-	4.404.800	4	30.336.600	100,00%	81,00%	4,00	30.336.600	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Rapat yang diikuti/dilaksanakan (Laporan)			-	0,00	-	120	87.970.000	60	40.863.625	80	27.544.210	126	14.379.000	190	-	190	82.786.835	100,00%	94,11%	190,00	82.786.835	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)			-	0,00	-	100	597.833.098	8	137.234.410	8	142.414.844	-	146.112.260	-	51.762.414	-	477.523.928	0,00%	79,88%	0,00	477.523.928	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			-	0,00	-	12	134.200.000	3	17.571.594	6	17.752.028	9	23.480.238	12	10.208.142	12	69.012.002	100,00%	51,42%	12,00	69.012.002	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			-	0,00	-	12	463.633.098	3	119.662.816	3	124.662.816	3	122.632.022	3	41.554.272	12	408.511.926	100,00%	88,11%	12,00	408.511.926	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*) (%)			-	0,00	-	100	98.430.000	14	12.444.350	14	27.931.750	-	31.486.275	-	19.702.625	-	91.565.000	0,00%	93,03%	0,00	91.565.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)			-	0,00	-	11	86.580.000	5	12.444.350	9	24.531.750	11	29.256.275	11	18.402.625	11	84.635.000	100,00%	97,75%	11,00	84.635.000	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)			-	0,00	-	18	11.850.000	-	-	5	3.400.000	9	2.230.000	18	1.300.000	18	6.930.000	100,00%	58,48%	18,00	6.930.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	67,59%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	-	-	450.008.368	-	-	199.241.918	-	133.060.793	-	-	-	-	332.302.711		73,84%		332.302.711	0,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-	-	108.579.928	-	-	42.076.840	-	29.737.900	-	-	-	-	71.814.740		66,14%		71.814.740	0,00%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)			-	0,00	-	7	7.862.346	-	-	4	2.798.940	7	-	-	-	11	2.798.940	100,00%	35,60%	11,00	2.798.940	0,00%	0,00%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	26	10.490.913	-	-	21	7.616.000	21	-	25	-	25	7.616.000	96,15%	72,60%	25,00	7.616.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	19	12.464.964	19	-	19	11.634.000	19	-	19	-	19	11.634.000	100,00%	93,33%	19,00	11.634.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	0,00	-	3	4.666.705	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0,00	-	20	73.105.000	-	-	5	20.027.900	8	29.737.900	15	-	15	49.765.800	75,00%	68,07%	15,00	49.765.800	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	53.408.552	-	-	-	50.649.700	-	-	-	-	-	50.649.700	-	94,83%	-	50.649.700	-	0,00%	
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-	0,00	-	3	23.726.052	3	-	3	21.349.700	3	-	3	-	3	21.349.700	100,00%	89,98%	3,00	21.349.700	0,00%	0,00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	0,00	-	1	29.682.500	1	-	-	29.300.000	-	-	-	-	1	29.300.000	100,00%	98,71%	1,00	29.300.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	238.384.366	-	-	-	106.515.378	77.422.893	-	-	-	-	183.938.271	-	77,16%	-	183.938.271	-	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	2	73.840.000	-	-	1	21.112.750	1	33.466.450	2	-	2	54.579.200	100,00%	73,92%	2,00	54.579.200	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	0,00	-	12	164.544.366	-	-	6	85.402.628	9	43.956.443	12	-	12	129.359.071	100,00%	78,62%	12,00	129.359.071	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	49.635.522	-	-	-	-	25.900.000	-	-	-	-	25.900.000	-	52,18%	-	25.900.000	-	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	0,00	-	2	49.635.522	-	-	-	-	1	25.900.000	2	-	2	25.900.000	100,00%	52,18%	2,00	25.900.000	0,00%	0,00%
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	95,16%	73,84%			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang			

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																						
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			-	-	14.933.460	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%					
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Pedoman/ Acuan Daerah di sektor Ketenagakerjaan (Tahun)		0,00	1	14.933.460	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Perusahaan)		0,00	8	14.933.460	-	-	-	-	-	-	8	8	100,00%	0,00%	8,00	-	0,00%	0,00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%					
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			-	-	944.232.429	650.000	19.211.400	132.520.220	506.882.500	659.264.120				69,82%	659.264.120	0,00%					
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih dan dimagangkan (Orang)		0,00	238	944.232.429	650.000	19.211.400	132.520.220	506.882.500	659.264.120				0,00%	69,82%	0,00	659.264.120	0,00%	0,00%		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih (Orang)		0,00	46	920.992.210	650.000	19.211.400	29	132.520.220	45	506.882.500	45	659.264.120	97,83%	71,58%	45,00	659.264.120	0,00%	0,00%		
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)		0,00	18	23.240.219	-	-	-	-	17	-	17	-	94,44%	0,00%	17,00	-	0,00%	0,00%		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	97,74%	69,82%					
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sedang					
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			-	-	147.119.845	17.532.000	30.222.740	48.702.040	4.614.080	101.070.860				68,70%	101.070.860	0,00%					
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terfasilitasi Pelayanan Antar Kerja di Tanah Laut (Orang)		0,00	100	119.341.345	45	17.532.000	76	27.252.660	-	30.400.660	-	3.383.700	-	78.569.020	0,00%	65,84%	0,00	78.569.020	0,00%	0,00%
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)		0,00	50	69.422.145	35	5.360.000	88	16.697.660	141	8.475.000	281	3.383.700	281	33.916.360	100,00%	48,86%	281,00	33.916.360	0,00%	0,00%
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Bimbingan dan Penyuluhan (Orang)		0,00	20	9.999.370	-	-	-	20	7.507.660	20	-	20	7.507.660	100,00%	75,08%	20,00	7.507.660	0,00%	0,00%	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Orang (Orang)		0,00	100	39.919.830	41	12.172.000	284	10.555.000	451	14.418.000	451	-	451	37.145.000	100,00%	93,05%	451,00	37.145.000	0,00%	0,00%

	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring LPTKS (Kali)	-	0,00	-	4	3.000.000	-	-	-	-	780	-	779.220	-	780.000	0,00%			
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Banyaknya monitoring ke LPTKS (Kali)	-	0,00	-	4	3.000.000	-	-	-	2	780	4	779.220	4	780.000	100,00%			
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang mendapat Perlindungan (PMI)	-	0,00	-	60	24.778.500	-	-	100	2.970.080	-	18.300.600	-	451.160	-	21.721.840	0,00%		
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	jumlah PMI (pra dan Purna) yang mendapatkan perlindungan (CPMI)	-	0,00	-	20	24.778.500	-	-	20	2.970.080	20	18.300.600	20	451.160	20	21.721.840	100,00%		
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		-		-		101.985.000			390.000							62.280.000	-	62.670.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pelaku HI terhadap Peraturan Per UU (%)	-	0,00	-	4	39.985.000	-		390.000	56						20.927.500	-	21.317.500	0,00%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Dokumen)	-	0,00	-	4	15.160.000	-		390.000	4						8.002.500	8	8.392.500	100,00%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	-	0,00	-	12	24.825.000	3			4						12.925.000	12	12.925.000	100,00%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan penanganan kasus perselisihan HI (Kasus)	-	0,00	-	5	62.000.000	-									41.352.500	-	41.352.500	0,00%
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	-	0,00	-	1	62.000.000	-									41.352.500	1	41.352.500	100,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)			-	0,00	-	3	297.109.706	1	123.612.837	1	20.869.979	3	107.834.494	3	11.740.000	3	264.057.310	100,00%	88,88%	3,00	264.057.310	0,00%	0,00%
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)			-	0,00	-	1	9.471.948	-	-	-	-	-	-	1	1.800.000	1	1.800.000	100,00%	19,00%	1,00	1.800.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	84,35%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi			
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				-		-		16.320.000	-	-	390	-	-	7.939.610	-	1.725.000	-	9.665.000		59,22%		9.665.000	0,00%	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				-		-		16.320.000	-	-	390	-	-	7.939.610	-	1.725.000	-	9.665.000		59,22%		9.665.000	0,00%	
	Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS (Dokumen)			-	0,00	-	1	9.480.000	-	-	-	-	-	4.520.000	1	-	1	4.520.000	100,00%	47,68%	1,00	4.520.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			-	0,00	-	1	6.840.000	-	-	390	-	-	3.419.610	1	1.725.000	1	5.145.000	100,00%	75,22%	1,00	5.145.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	59,22%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah			

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							80.016.376						10.900.000	7.517.440	18.417.440	23,02%		18.417.440	0,00%		
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri (Dokumen)						80.016.376						10.900.000	7.517.440	18.417.440	0,00%	23,02%	0,00	18.417.440	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)						80.016.376						10.900.000	7.517.440	18.417.440	100,00%	23,02%	1,00	18.417.440	0,00%	0,00%
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	23,02%			
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
								12.146.930.591									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		99,56%	67,10%		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sedang		

disnakerind
K O M P E T I T I F

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum SKPD Disnakerind melaksanakan apa yang menjadi kewajiban regulasi terkait dengan pelayanan ketenagakerjaan, dan perindustrian di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, serta peraturan lain yang berlaku maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Disnakerind sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Disnakerind harus menjadi organisasi pembelajaran (*learning organization*) dan mencerminkan *good government*, serta didukung oleh kinerja aparatur profesional yang handal.

Adapun kinerja pelayanan Disnakerind Kabupaten Tanah Laut berdasarkan, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan sasaran Renstra Disnakerind Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :



disnakerind
K O M P E T I T I F

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Uraian Indikator	Satuan	IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	752	500	500	500	500	1830	741	1514	500	1141	243%	148%	303%	100%	228%
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	Wirausaha Baru	120	140	160	180	240	691	18	200	306	451	576%	13%	125%	128%	188%
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	Pecaker yang ditempatkan	100	110	120	125	130	89	182	260	119	281	89%	165%	217%	92%	216%
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persentase	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	30%	25%	27%	30%	32%	63%	64%	40%	25%	20%	210%	257%	148%	78%	63%
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	Pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif	15,500	15,500	16,000	16,500	17,000	22,339	21,084	19,140	19,816	24,638	144%	136%	120%	117%	145%
6	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	13,65%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%	12,51%	12,30%	12,56%	12,50%	12,6%	92%	87%	84%	80%	77%
7	Pertumbuhan industri	Persentase	Pertumbuhan industri	4,63%	3,81%	4,21%	4,51%	5,43%	2,51%	-4,27%	5,01%	3,86%	4,60%	54%	-101%	119%	71%	85%

disnakerind
K O M P E T I T I F

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Ada beberapa yang menjadi isu terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian antara lain :

1. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.

Masalah tersebut disebabkan masih rendahnya kompetensi tenaga kerja local berdasarkan SKKN (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas. Rendahnya akses dan kesempatan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan peserta yang dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kurangnya ketersediaan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk bisa diakses oleh tenaga kerja dan peserta latih, sehingga mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja atau peserta latih untuk mengikuti uji kompetensi dalam memperoleh sertifikasi profesi. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, BLK Komunitas, LPK Swasta dan LPK pada perusahaan) yang masih belum maksimal.

2. Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja.

Masalah tersebut disebabkan masih belum maksimalnya pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang terintegrasi dan belum optimalnya perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru.

Belum optimalnya sistem pelayanan penempatan tenaga kerja terintegrasi hal ini dikarenakan pelayanan informasi pasar kerja (lowongan kerja dan Pencari kerja) masih terkendala sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam memberikan pelayanan penempatan kerja. Pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja (LPTKS dan bursa kerja

khusus) yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru, tenaga kerja mandiri, padat karya, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI Purna serta penerapan teknologi tepat guna masih belum optimal dilaksanakan.

3. Rendahnya perlindungan tenaga kerja.

Masalah tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan tenaga kerjaterhadap norma ketenagakerjaan, masih rendahnya kepedulian pelaku usaha terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan. Para pelaku usaha dan tenaga kerja kepatuhannya terhadap norma ketenagakerjaan masih rendah, belum terciptanya sinergitas antar stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, organisasi, pengusaha, organisasi pekerja/buruh, BPJS), belum patuhnya pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

4. Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Masalah tersebut disebabkan oleh belum memadainya sumber daya manusia yang ada, masih lemahnya daya saing IKM dan masih rendahnya informasi pertumbuhan industry kecil dan menengah. Peningkatan kemampuan/skill serta wawasan dari pelaku industri masih rendah, sehingga mempengaruhi pada sektor industri pengolahan, baik hasil produksinya, kemasan, pemasaran maupun tehnik pengolahan, selain itu juga masih kurangnya pemanfaatan tehnologi informasi. Hal ini akan membuat hasil

produk-produknya tidak bisa bersaing dengan produk-produk luar daerah dipasaran.

5. Peningkatan Legalitas Kawasan Industri Jorong.

Saat ini Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tanggal 17 April 2023 dengan indikasi Pemanfaatan Ruang berupa Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan Pengembangan Industri berbasis Sumber daya alam Jorong. Sembari menuju legalitas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), saat ini PT. Wahyu Putra Ramadhan selalu pengelola, juga sedang mengurus perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah berkaitan dengan status Pelabuhan Pelaihari dimana saat ini statusnya adalah pengumpan lokal dengan kedalaman ujung dermaga 5 meter lws. Dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal, menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Jorong. Investor berharap kapasitas pelabuhan dapat di tingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Pengumpul dengan kapasitas sandar kapal mencapai 5000 sd 7000 DWT dengan kedalaman ujung dermaga mencapai 7 meter lws agar proses bongkar muat terutama industri pangan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk menarik minat investor, diperlukan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur dasar dalam kawasan serta perlu usaha lebih lagi dari Pemkab Tanah Laut mempromosikan Kawasan Industri Jorong.

6. Pembangunan Kawasan Perwilayan Industri.

Lokasi Kawasan Peruntukkan Industri saat ini tersedia di tiap kecamatan sesuai dengan kajian Perwilayahan Industri dan data masukan dari tiap kecamatan. KPI di setiap kecamatan dialokasikan bagi Industri Kecil dan Menengah, untuk Industri Besar tetap kita arahkan ke Kawasan Industri Jorong. Dengan adanya KPI, maka diharapkan adanya pemerataan pembangunan industri dan dapat meningkatkan daya saing serta memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Seyogyanya KPI juga ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri meupun infrastruktur penunjang dalam KPI sehingga dapat mendorong investasi dan hilirisasi industri kecil dan menengah masuk ke daerah.

7. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pada PP 29/2018 ini disebutkan, sentra IKM merupakan sekelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri atas paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Dengan adanya sentra-sentra IKM, maka hal ini dapat memudahkan para pengusaha dalam mengolah dan memasarkan produknya. Di samping itu juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang telah dilakukan pemerintah antara lain meliputi pemberian bantuan berupa peralatan atau mesin hasil penemuan baru, teknologi tepat guna, bantuan kemitraan, promosi dan pameran, serta studi banding, diimplementasikan

dalam program pembinaan dan pengembangan IKM yang meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan mengacu pada program pembinaan dan pengembangan IKM di atas, maka sudah barang tentu sentra-sentra IKM akan terhindar dari masalah-masalah klasik seperti permodalan, pemasaran, manajemen, keterampilan teknis, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat, maka konsumsi atas produk tersebut juga cenderung meningkat. Kenaikan permintaan ini mendorong peningkatan kapasitas produksi. Hal ini akan menimbulkan masalah jika peningkatan kapasitas produksi ini tidak dapat diimbangi dengan pasokan bahan baku yang cukup.

2.4 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada dasarnya telah menyentuh kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya Program Peningkatan Kesempatan Kerja yang bertujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan (*soft skill*) masyarakat, untuk peningkatan kemampuan industri kecil dan menengah akan dicover oleh Bidang Perindustrian dengan Program Perencanaan Pembangunan Industri.

Di sisi peningkatan kemampuan keterampilan masyarakat (*hard skill*), UPT Balai Latihan Kerja selalu mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan baik di UPT. BLK maupun sampai ke pedesaan termasuk melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD akan disampaikan setelah tahapan Musrenbang Kecamatan dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah diterima. Tahun 2025 yang diakomodir adalah usulan masyarakat pada musrenbang, sedangkan usulan

melalui pikir-pikir DPRD tidak diakomodir. Adapun usulan masyarakat pada Musrenbang Kecamatan yang telah diakomodir pada Tahun 2025 dapat dilihat tabel berikut :



disnakerind
K O M P E T I T I F

Tabel 2.17

LAPORAN USULAN DESA (MUSRENBANG) PADA SIPD TAHUN 2025

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA
1	915290	10-01-2024	ABDUL MUHID	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	(5).Masih Banyak nya Para Pemuda Dan Karang Taruna Yang memerlukan Pelatihan	Dusun 1 s.d Dusun 4, Kab. Tanah Laut	Jorong	Asam-Asam	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
2	931758	11-01-2024	SAILIL IRPAN	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Banyak Pengangguran	Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati , Kab. Tanah Laut	Bati Bati	Benua Raya	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
3	942460	12-01-2024	MAHYUDIN	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Banyak nya wanita-wanita masih produktif di Desa Handil Gayam namun tidak ada keterampilan sehingga perlu adanya pelatihan khusus agar bisa meningkatkan keterampilan dan membantu perekonomian keluarga	Desa Handil Gayam, Kab. Tanah Laut	Bumi Makmur	Handil Gayam	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
4	951389	12-01-2024	SITI KHOIRIYAH, SP	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Untuk pemberdayaan warga Desa Sukaramah yang dalam kondisi tidak bekerja perlu adanya pelatihan mebelair, diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut warga mampu untuk bekerja secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga	Sukaramah, Kab. Tanah Laut	Panyipatan	Suka Ramah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
5	955127	12-01-2024	HADRANSYAH	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	ADA BEBERAPA TUKAN/ KULI DI DESA KAMI YANG SANGAT BAGUS DALAM BEKERJA TETAPI KURANGNYA ALAT DAN PEMBELAJARAN PERTUKANGAN	JL. RAYA TAKISUNG RT 14, Kab. Tanah Laut	Takisung	Takisung	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
6	960273	13-01-2024	MULIAN	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Banyaknya warga desa yang masih belum memiliki keterampilan untuk penunjang pekerjaan	Desa Kintap , Kab. Tanah Laut	Kintap	Kintap	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
7	976367	15-01-2024	SAMSIAR	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	banyak nya pemuda desa yang memerlukan pelatihan-pelatihan	Dusun 1,Dusun 2 dan Dusun 3, Kab. Tanah Laut	Tambang Ulang	Gunung Raja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
8	978166	15-01-2024	SAHRUDIN	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Tenaga Kerja Terampil Kurang	RT 08 Desa Salaman KM 20, Kab. Tanah Laut	Kintap	Salaman	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD
9	984489	15-01-2024	BURAHIM R	Kelurahan / Desa	Pelatihan-Pelatihan tenaga kerja	Banyak ya pemuda Desa yang memerlukan pelatihan-pelatihan	Dusun 1 dan Dusun 2 Desa martadah , Kab. Tanah Laut	Tambang Ulang	Martadah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Verifikasi Kecamatan	-	Disetujui untuk ditindaklanjuti SKPD

2.5 Usulan Kegiatan Yang Bersumber dari Dana Non APBD

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka peran dan fungsi pemerintah pusat telah bergeser. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak lagi berperan sebagai perencana sekaligus pelaksana tetapi bergeser menjadi regulator, mediator, motivator dan fasilitator. Konsekwensi logis dari perubahan ini adalah sistem dan mekanisme kerjasama antar lembaga pelatihan dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip saling ketergantungan positif, saling menguntungkan dalam mewujudkan otonominya masing-masing. Untuk itu dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja perlu menempatkan pencari kerja, para penganggur maupun tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan/ skill nya sebagai pelaku utama perlu program yang terpadu, sinergi dan relevan agar sumber daya pelatihan dapat berjalan dengan optimal, berdaya guna dan berhasil guna.

Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja sehingga dapat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang memerlukan skill untuk terjun ke dunia kerja baik di industry maupun berwirausaha mandiri, skill sebagai modal dasar maupun penunjang dalam menggali sumber-sumber ekonomi di lingkungannya juga perlu dibekali dengan inovasi pengetahuan, keterampilan, dorongan semangat serta motivasi, guna menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih mantap, sehingga akan timbul sikap positif pada diri pencari kerja untuk mandiri, inovatif, bersemangat, tidak mudah menyerah dan selalu berupaya untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut,

diperlukan suatu kegiatan pelatihan keterampilan tenaga kerja bagi para pencari kerja, pengangguran dan tenaga kerja yang ingin meningkatkan kompetensinya.

Pengembangan metode Pelatihan bersifat bottom up (berdasarkan aspirasi/ kebutuhan masyarakat) sangat tepat, karena akan lebih terarah pada usaha pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (Community Empowerment and Community Development). Karena dalam metode ini masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap program pelatihan (partisipatif) mulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pelatihan, pelaksanaan tahap evaluasi pasca pelatihan maupun pendampingan. Upaya pembinaan masyarakat ini bersifat berkelanjutan, karena tujuan untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri tidak dapat dicapai seketika, memerlukan waktu yang lama.

Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi tugas dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Dana APBN memiliki peran dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui Pelatihan maupun peningkatan kemampuan, keterampilan/ skill dan kompetensi. Berkaitan dengan hal tersebut, di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan dan program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, selain itu juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia baik aparat pelaksana maupun tenaga kerja serta mengantisipasi kesenjangan kemampuan dan keterampilan, selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan.

Untuk Perencanaan Tahun 2023 UPT. BLK Pelaihari membuat usulan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana APBN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18

Usulan PBK UPTD 2025

Nama BLK
Kapasitas Latih Per Tahun (kelembagaan.kemnaker.go.id)

: BLK Pelaihari
: 640 orang

Kejuruan	Bidang Kompetensi	Boarding / Non Boarding / Blended / Online	Usulan UPTD (orang)
1	2	3	4
PBK UPTD			
Kejuruan TIK			
Operator/Pelaksana (≤ Kualifikasi Level 3)			
Program Pelatihan TIK	Desainer Grafis Muda	Non Boarding	16
Program Pelatihan TIK	Computer Operator Asistant	Non Boarding	32
Kejuruan Listrik			
Program Pelatihan Listrik	Pemasangan Instalasi Otomasi Industri	Non Boarding	0
Program Pelatihan Refrigerasi	Teknisi perawatan AC residensial	Non Boarding	16
Kejuruan Las			
Program Pelatihan Las	Pelate welder SMAW 3GUP/PF	Non Boarding	16
Kejuruan Prosesing			
Program Pelatihan PHP	Pembuatan Roti dan Kue	Non Boarding	0
Program Pelatihan PHP	Pengolahan Ikan	Non Boarding	16
Total			96

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi,
Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2025
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Optimalisasi Sektor Industri, Umkm, Pertanian Dan Pariwisata	2. Peningkatan Kualitas SDM, Akuntabilitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Program Perencanaan Tenaga Kerja 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 4. Program Penempatan Tenaga Kerja 5. Program Hubungan Industrial
3. Memperkuat Stabilitas	3. Meningkatkan Tata Kelola		

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2025
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik		6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sedangkan yang menjadi strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		
1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, PAUD, dan Kesetaraan	Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah yang memadai dan layak guna
		Meningkatkan jumlah Sekolah yang terakreditasi	Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan
			Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan

	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
				Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif
				Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan	Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera	Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
				Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan
				Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender
				Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan			
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian

				Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
				Penyediaan akses terhadap informasi pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
			Meningkatkan populasi dan produksi peternakan	Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak
				Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.
				Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak.
				Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing.
				Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
				Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di sektor industri		Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
				Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
				Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM
2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Memperkuat pertumbuhan ekonomi di perdagangan		Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah

				Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
				Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah
			Peningkatan kualitas kinerja Koperasi dan UMKM naik kelas	Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah	Pengembangan pemasaran pariwisata
				Pengembangan destinasi pariwisata prioritas
				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing	Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal
				Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan	Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
				Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana
				Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan.
			Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan	Penyediaan Infrastruktur persampahan

				Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan
			Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Laut
				Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana perhubungan
				Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan
			Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah
				Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan
2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan sampah perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle
			Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah
2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS		Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor	Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima penerima bantuan
				Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "GAMIS" (Gerakan Atasi Kemiskinan)
				Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
				Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosia Bagi PMKS.

				Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat	Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
				Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan
			Meningkatkan Penempatan tenaga kerja	Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja
				Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja
			Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	meningkatkan status atau kelas desa	Pembiayaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja/kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.	Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan.
				Penerapan Satu data Tanah Laut
				penyuluhan sistem inovasi daerah
			Meningkatkan pengawasan, transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan level Maturitas SPIP
				Peningkatan Level Kapabilitas APIP
				Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

				Peningkatan Kualitas Pengelolaan pendapatan Daerah
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha
				Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan
				Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
				Peningkatan kompetensi, profesionalitas dan disiplin ASN serta budaya kerja
				Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik
				Peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				Peningkatan kualitas e-procurement
				Peningkatan kualitas Layanan pada kecamatan
			Meningkatnya penataan peraturan perundangundangan daerah dan penegakan Perda.	Peningkatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-Government

disnakerind
K O M P E T I T I F

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Sesuai dengan konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”** ditetapkan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja.
 - c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.
2. Tujuan **“Meningkatkan Laju Sektor Industri Pengolahan”** ditetapkan sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah”.
3. Tujuan **“Meningkatkan Akuntabilitas kinerja SKPD”** ditetapkan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian”.

Dari 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam RKP 2024-2026, yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”** ditetapkan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja.
 - c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.
2. Tujuan **“Meningkatkan Laju Sektor Industri Pengolahan”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah”**.
3. Tujuan **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian”**.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas diperlukan beberapa strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaannya. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

disnakerind
K O M P E T I T I F

Tabel 3.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN			
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2024-2026			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja	1 Peningkatan Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Akses Uji Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Peserta Latih
			2 Meningkatkan Kesempatan Pelatihan di tempat Kerja (Pemagangan) bagi Tenaga Kerja dan Peserta Latih.
			3 Membangun jejaring Kerjasama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi tenaga kerja dan peserta latih
			4 Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, BLK Komunitas, LPK Swasta dan LPK pada perusahaan)
			5 Memfasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja untuk Meningkatkan Kapasitas dan memperoleh Akreditasi.
			6 Mengembangkan Jejaring Kerjasama untuk melaksanakan Upgrading Instruktur dan Tenaga Latih.
			7 Mengembangkan Jejaring kerjasama LPK dengan Perusahaan/Industri untuk mengembangkan Kapasitas LPK.
			8 Meningkatkan Pembinaan program produktivitas pada perusahaan.
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 Optimalisasi Perencanaan Tenaga Kerja	1 Akselerasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
		2 Peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	2 Peningkatan Pelayanan Antar Kerja
			3 Peningkatan Perlindungan CPMI, Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya
			4 Pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan penempatan yang representatif
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	1 Meningkatnya pencatatan dan Pengesahan dokumen norma Ketenagakerjaan.	1 Jumlah Pencatatan Perjanjian PKWT(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
		2 Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Penerima Upah dan Pekerja bukan Penerima Upah.	1 Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah.
		3 Peningkatan jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Laju Sektor Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	1 Perencanaan, Penataan dan Pembangunan pada sektor Industri	1 Melaksanakan kebijakan percepatan pengembangan dan Perwilayahan Industri.
		2 Peningkatan Daya saing dan Pertumbuhan Industri	2 Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Industri melalui kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam rangka mendorong penerapan teknologi industri.
		3 Peningkatan Sistem Informasi Industri	3 Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Standarisasi Industri.
			4 Melaksanakan Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah melalui Peran serta masyarakat.
			5 Meningkatkan penggunaan sistem informasi industri.
			6 Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Industri.
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerind	1 Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel
			2 Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			3 Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			4 Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
			5 Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			6 Optimalisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah

disnakerind
K O M P E T I T I F

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan dalam rencana strategis.

Secara garis besar rencana Program Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 oleh Dinas sebanyak sebanyak **8 Program, 20 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan** dengan anggaran **sebesar Rp. 26.442.498.606,-** (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) sedangkan yang akan dilaksanakan oleh UPT. Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak **2 Program, 5 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan** dengan prakiraan anggaran sebesar **Rp. 3.665.726.092,-** (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah). Total Dinas dan UPT. BLK akan melaksanakan **10 Program, 25 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan** dengan total seluruh anggaran sebesar **Rp. 30.108.224.698,-** (Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Lokasi pelaksanaan Program Kegiatan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut maupun di luar Kabupaten Tanah Laut.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dapat tersaji pada tabel di bawah ini :



disnakerind
K O M P E T I T I F

Tabel 4.1

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2025													
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT													
Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ dan Sub Kegiatan Keppmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SEKRETARIAT										
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan sekretariat Disnakerin	Nilai	90	11.487.612.946		90	12.102.696.356			
2	07	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase	100	13.344.536	100	15.644.274			
2	07	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.961.171	Renstra, Renja, RKA, DPA	5	7.153.405
2	07	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	7.383.365	LKJ, LKPJ/LPPD, MR, Laporan Statistik, laporan evaluasi fisik dan keuangan	5	8.490.869
2	07	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	7.580.768.410		100	8.380.602.081
2	07	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	7.572.815.906	PNS 40 + P3K 1 (usulan tambahan PNS 3 + P3K 1)	48	8.371.456.702
2	07	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	7.952.504	Laporan penatausahaan Keuangan, CALK	2	9.145.380
2	07	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase	100	36.000.000	Sesuaiakan 100 %	100	45.500.000
2	07	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-		0	-
2	07	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	36.000.000	Bimtek kompetensi	7	45.500.000
2	07	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	837.500.000		100	1.000.950.000
2	07	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	85.000.000	Tambah daya (rumah kemasan)	7	100.000.000
2	07	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	50.000.000	ATK, aksesoris komputer,	13	70.500.000
2	07	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	26	23.000.000	Alat dan bahan pembersih	26	26.450.000
2	07	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	39.500.000	FC, Spanduk, Map, Jilid, kwitansi	5	41.000.000
2	07	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	akan di nol kan (sesuaikan)	2	15.000.000
2	07	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	75.000.000	Tala Expo dan pameran Anggrek	2	80.000.000
2	07	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	32.000.000	laporan per bulan	12	40.000.000

2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	500.000.000		laporan rapat dan perjadin	12	600.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	13.000.000		map dan box arsip, + anggaran sub keg bahan bacaan	1	3.000.000
2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000		pemeliharaan dan update aplikasi SOS	1	25.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	1.700.000.000		Sesuaiakan 100 %	100	1.140.000.000
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000		R4 Kepala Dinas	0	0
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	1.120.000.000		R4 1 BLK (untuk angkut peserta) R2 2 Trail	2	900.000.000
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	22	80.000.000		meja(7) , kursi (7) , sofa (1) lemari (4), kursi tunggu (3)	22	120.000.000
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	100.000.000		sesuaikan jadi 8 unit AC (4) Laptop (3) PC (1)	27	120.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	960.000.000		Sesuaiakan 100 %	100	1.020.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	160.000.000		PLN, PDAM, internet puspro dan Dekranasda	12	170.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	800.000.000		PTT (24 orang)	12	850.000.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	360.000.000		Sesuaiakan 100 %	100	500.000.000
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	50.000.000		2 R4 (mobil kadis + usulan 1 sekretaris)	2	110.000.000
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	17	190.000.000		R2 9 R4 6 R4 1 + R2 1 (BLK)	19	185.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000		AC (4) genset (1)	7	45.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	60.000.000		perbaikan (rehab ringan) puspro dan rumah kemas	2	100.000.000
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	40.000.000		papan nama kantor dan tiang bendera (pusro & rumah kemas)	2	60.000.000

BIDANG P2TK															
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke RTK	Persentase	6,9	350.000.000			7	385.000.000
2	07	02	2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase	100	350.000.000			100	385.000.000
2	07	02	2.01	0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	315.000.000		Dokumen RTK	1	345.000.000
2	07	02	2.01	0003		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Orang	15	35.000.000		SDM dari perusahaan (perwakilan)	15	40.000.000
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		presentase peserta latih yang terserap dudi	Persentase	74,05	1.361.128.746			75	1.511.128.746
								Persentase tenaga Kerja bersertifikat/berkompeten	Persentase	0,16				0,17	
2	07	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	Persentase	100	1.066.668.098			100	1.181.668.098
2	07	03	2.01	0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	192	839.994.180		target berubah jadi 192 1. Uang Saku Peserta 2. makan minum 3. seragam APD 4. honor instruktur/ narsum 5. perjadin peserta dan pendamping 6. alat dan bahan administrasi pelatihan (atk, spanduk, dll)	110	939.994.180
2	07	03	2.01	0002		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	14	76.480.468		sesuaikan renstra (14 lembaga) LPK swasta (10) ke Balai Besar (4) kegiatan : 1. Rapat 2. Studi banding (peserta dari LPK swasta) 3. pelatihan instruktur dan pengelola (untuk non ASN) 4. Biaya UJK (honor & sertifikat)	30	91.480.468
2	07	03	2.01	0003		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	9	150.193.450		target menjadi 9 unit (3 BLK/LPK) 1. Komputer (3) 2. Printer (3) 3. Proyektor (3)	6	150.193.450
2	07	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase	100	190.000.000			100	215.000.000
2	07	03	2.02	0001		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20	190.000.000		17 LPK lama + 3 LPK baru [bhs Jepang (2) otomotif (1)], dan 1 BLK komunitas baru (batu ampar)	20	215.000.000
2	07	03	2.04			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Capaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		100	104.460.648		Sesuaikan 100 %	1	114.460.648
2	07	03	2.04	0001		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	30	104.460.648		target menjadi 30 perusahaan yang melaksanakan konsultasi (rapat, perjadin, narsum) persiapan Sidhakarya dan Paramakarya	50	114.460.648

2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Persentase	6,9	3.337.111.314			7	3.688.111.314
2	07	04	2'01		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui mekanisme pelayanan antar kerja	Persentase	100	2.061.111.314			100	3.131.111.314
2	07	04	2'01	0002	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	100	810.000.000		target berubah (100 orang) Rapat dan Perjadin	842	940.000.000
2	07	04	2'01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	20	500.022.661		target berubah (20 orang) pelaksanaan penyuluhan 1 kelas (20 orang)	846	825.022.661
2	07	04	2'01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	370	751.088.653		target berubah (120+250= 370) 1. pelatihan (sektor informal) ((20x4)+(40x1)= 120 orang)) 2. kegiatan matching bussines (kewirausahaan) (mempertemukan peserta pasca pelatihan dengan pengusaha yang memerlukan) (250 orang/ perwakilan IKM)	1790	1.366.088.653
							Jumlah pembayaran dana kompensasi penggantian tenaga Kerasias (DKK) untuk penggantian RPTKA pada tahun 2024 bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/kota yang di validasi	SKRD						
2	07	04	2'02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	21.000.000			100	27.000.000
2	07	04	2'02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	1	21.000.000		target berubah jadi 1 1.perjadin terkait pengawasan 2.rapat pembentukan (utk yang baru)	7	27.000.000
2	07	04	2'03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	100	755.000.000			100	845.000.000
2	07	04	2'03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	25.000.000		cetak dokumen ATK administrasi	1	35.000.000
2	07	04	2'03	0003	Job Fair /Bursa Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	85	730.000.000		bayar pihak ke 3 (EO) dan perjadin	100	810.000.000
2	07	04	2'04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	500.000.000			100	530.000.000
2	07	04	2'04	0001	Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/Pekerja Migran Indonesia)	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Calon PMI yang dilindungi dan dititipkan ke peternak	Orang	0	0			15	200.000.000
2	07	04	2'04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Orang	5	80.000.000		target berubah jadi 5 (karena kab. Tanah Laut bukan kantong PMI) perjadin (penjemputan, pengantaran dan pendampingan PM)	9	90.000.000
2	07	04	2'04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	100	220.000.000		pelatihan 5 x 20 (termasuk kegiatan pendataan) perjadin, ATK	100	240.000.000

BIDANG HIJSTK													
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	36	5.276.145.600		38	630.000.000
2	07	05	2,01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	5.156.145.600		100	500.000.000
2	07	05	2,01	0001		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	5	175.000.000	target berubah jadi 5 perusahaan 1.sosialisasi ketenagakerjaan 2.perjadin (monitoring) 3.uang harian peserta 4. honor narsum	12	200.000.000
2	07	05	2,01	0002		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	1	0	Tambahan sub kegiatan		
2	07	05	2,01	0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	12	4.981.145.600	1.Rapat (BPJS, dewan pengupahan, ketenagakerjaan) 2.pembayaran iuran BPJS naker bagi sektor informal (23.716 peserta @Rp. 16.800 x 12 bulan = Rp. 4.781.145.600) 3.perjadin (dewan pengupahan), 4.monev BPJS, pengupahan 5.Honorarium dewan pengupahan	12	300.000.000
2	07	05	2,02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persentase	100	120.000.000		100	130.000.000
2	07	05	2,02	0002		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	0	Tambahan sub kegiatan		
2	07	05	2,02	0004		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	120.000.000	1.Rapat (LKS tripartit) 2.pembinaan (monev dalam daerah) 3.honorarium 4.Pelaksanaan Hari Buruh (Sewa tempat, tenda, souvenir, makmin, spanduk dll)	1	130.000.000
BIDANG PERINDUSTRIAN													
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	Persentase	2,50%	4.310.500.000		2,75%	1.402.981.084
3	31	02	2,01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase	75	4.310.500.000		100	1.402.981.084
3	31	02	2,01	0002		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	250.000.000		1	157.981.084
3	31	02	2,01	0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	525.000.000	dokumen kegiatan (1)pelatihan, (2) lomba dan (3) magang	3	550.000.000

3	31	02	2,01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	2.500.000.000	Laporan pembangunan workshop rumah kemasan, paving blok, mesin kemas dan mengakomodir bantuan peralatan produksi, pembuatan taman puspro tambang ulang, fasilitas hak merk	1	2.500.000.000
3	31	02	2,01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	950.000.000		5	750.000.000
3	31	02	2,01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	57.500.000	laporan pelaksanaan RPIP (cetak dan FC) Rakor	1	20.000.000
3	31	02	2,01		pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal (JPH) di level Kabupaten		Jumlah Objek pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat diawasi-jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat di implementasikan	Dokumen	5	28.000.000	Tambahan Sub Kegiatan usulan anggaran 28.000.0000 fasilitas sertifikat halal 5 IKM @5jt monitoring IKM halal (perjadin) (3jt)		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		persentase pemantauan dan pengawasan industri terdaftar siinas	Persentase	35%	90.000.000	perbaiki jadi 90 juta	40%	241.500.000
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	35%	90.000.000		35%	241.500.000
3	31	03	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	30.000.000	1. perjadin monitoring industri (besar, menengah dan kecil) 2. rapat 3. sosialisasi 3. honorarium narsum 4. laporan pengawasan perizinan & rekomendasi perizinan	2	241.500.000
3	31	03	2,01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka enerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) denganskala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	60.000.000	target ubah jadi 1 dokumen (renstra dan renja) 1. rapat 2. sosialisasi 3. perjadin 4. honorarium narsum	40%	132.050.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data Industri yang masuk kedalamSiINas dan Sistem Informasi Data Industri	Persentase	100	230.000.000		100	132.050.000
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pelaporan data industri melalui SIINAS	Persentase	100	230.000.000		1	81.025.000
3	31	04	2,01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	230.000.000	Pendataan industri (perjadin dan honor petugas pendata) cetak laporan	2	51.025.000
TOTAL DINAS										26.442.498.606			

2	07	01		BLK					nilai	834.740.000			1.042.752.000	
2	07	01	2,06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
2	07	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	258.900.000		100	329.402.000		
2	07	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.650.000		alat dan bahan instalasi listrik	5	15.000.000
2	07	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	50.000.000		ATK kantor	15	75.000.000
2	07	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	15.250.000		alat dan bahan kebersihan	2	17.250.000
2	07	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	8.000.000		FC dan cetak map, spanduk dll	2	12.152.000
2	07	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	50.000.000		per bulan	12	60.000.000
2	07	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	125.000.000		rapat dan perjadin	12	150.000.000
2	07	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100.000.000			100	130.000.000
2	07	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	50.000.000		3 kursi, 3 meja (usulan 6)	4	70.000.000
2	07	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000		AC (2 unit)	2	60.000.000
2	07	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	73.840.000			100	259.350.000
2	07	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	73.840.000		PLN dan PDAM, wifi	12	75.250.000
2	07	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0		di tarik ke Disnakerin	12	184.100.000
2	07	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	402.000.000			100	324.000.000
2	07	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50.000.000		R4 (5) R2 (2)	7	70.000.000
2	07	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	50.000.000		AC, komputer,printer dan genset	15	70.000.000
2	07	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	152.000.000		rehab workshop, rehab plafon, pemasangan keramik workshop jahit (anggaran 300jt)	3	152.000.000
2	07	01	2,09	0010	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000		cat pagar, bikin got drainase (anggaran 150jt)	1	32.000.000
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			presentase peserta latih yang berkompeten	Persentase	74,05	2.830.986.092			75	2.840.986.092
2	07	03	2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan klaster kompetensi	Persentase	100	2.830.986.092		100	2.840.986.092		
2	07	03	2,01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	352	2.064.486.092		22 paket pelatihan paket APBN menurun jadi 7 paket	352	2.064.486.092
2	07	03	2,01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	10	126.500.000		UJK bekerjasama dengan LSP/LSK	10	126.500.000
2	07	03	2,01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Tanah Laut	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	35	640.000.000		mesin jahit (8), komputer (24), oven (1), aired condensor cleaning (1), AC bahan praktek	28	650.000.000
				TOTAL BLK						3.665.726.092				
				TOTAL DINAS DAN BLK						30.108.224.698				

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan aplikasi dari penjabaran program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan analisa kebutuhan SKPD yang jadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025. Renja dijadikan sebagai sarana dalam pengambilan kebijakan baik yang berjalan maupun penyusunan kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan. Dengan mengaju pada renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut agar dapat menjabarkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

Pada bab ini juga disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Yang perlu mendapat perhatian pada Renja 2025 adalah masih minimnya pagu anggaran yang diterima, namun demikian kami berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan anggaran yang tersedia walaupun kemungkinan realisasi target yang dicapai tentunya akan mengalami penurunan.

b. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 diharapkan dapat memaksimalkan ketersediaan anggaran dan juga dapat mengoptimalkan dana dari Pemerintah Pusat melalui dana APBN, khususnya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan di BLK.

c. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 diharapkan juga dengan adanya anggaran dari APBD Perubahan 2025 sehingga instrument kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada APBD Murni 2025 dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025.

Pelaihari, 5 Juli 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, SSTP
NIP. 19770705 199612 1 004

disnakerind
K O M P E T I T I F